



# LAPORAN PERJANJIAN (LAPKIN) TAHUN 2020



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jl. Mahoni Komplek Pertanian Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat

## DAFTAR ISI

Halaman

### PENGANTAR

### IKHTISAR EKSEKUTIF

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Dasar Hukum Pembentukan Instansi.....1
- 1.2 Struktur Organisasi .....1
- 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Instansi .....2
- 1.4 Sumber Daya Manusia.....3
- 1.5 Aspek Strategis Organisasi .....3
- 1.6 Sitematika Penyajian .....5

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2020.....6

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi .....10
  - a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....10
  - b. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....11
- 3.2 Realisasi Anggaran .....15

#### BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan .....17



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 telah selesai disusun.

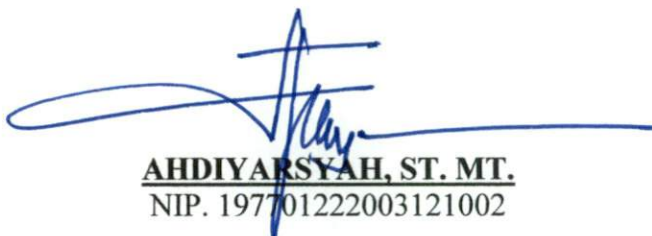
Penyusunan LAPKIN ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategis berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi data, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 14 kegiatan dengan 7 (Tujuh) program, dimana sebagian besar kegiatan terlaksana dengan sangat baik dan ada kegiatan yang capaiannya kurang baik. Mengenai capaian indikator kinerja kegiatan tersebut akan diuraikan dalam Bab-bab Laporan ini.

Segala keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat akan tetap dipertahankan dan diusahakan supaya lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/ hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Padang Tujuh, Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Pasaman Barat



**AHDIYARSYAH, ST. MT.**  
NIP. 197701222003121002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Hukum Pembentukan Instansi**

Adapun dasar hukum pembentukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang perubahan petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat;
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021
7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

### **1.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 dengan susunan organisasi sebagai berikut

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 dengan susunan organisasi sebagai berikut

- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| • Kepala Dinas                        | : <b>Ahdiyarsyah, ST. MT.</b> |
| • Sekretaris                          | : <b>Winardi, S.Pi</b>        |
| - Kasubag Umum & Kepegawaian          | : <b>Sri Mulyani</b>          |
| - Kasubag Keuangan, Program dan Asset | : <b>Mudirman, SE</b>         |



- Kepala Bidang Pertanahan : **Afrizal, SE**
  - Kepala Seksi Administrasi Pertanahan : **Berhat Nanang K, ST**
  - Kepala Seksi Fasilitas Konflik/Sengketa Pertanahan : **Eki Yuherman, SE**
  - Kepala Seksi Ganti Rugi Untuk Kepentingan Umum : **Isramora**
- Kepala Bidang Kawasan Permukiman : **Asri Hamdi, ST**
  - Kepala Seksi Perencanaan Permukiman : **Ziad Abdul Rozaq, ST, MT**
  - Kepala Seksi Infrastruktur Permukiman : **Zakial Himmy, ST**
  - Kepala Seksi Pengembangan Permukiman : **Zulfitri**
- Kepala Bidang Perumahan : **Ali Audah, ST**
  - Kepala Seksi Perencanaan Perumahan : **Taufik Imran, ST**
  - Kepala Seksi Rumah Khusus/Swadaya : **Diary Fadli, ST**
  - Kepala Seksi Perumahan Umum/Komersial : **Popi Jasmiati, ST**

### **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Instansi**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintah Konkuren Wajib Pelayanan dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Kabupaten mempunyai fungsi adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan permukiman;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan umum di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembinaan tugas dibidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi urusan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
4. Melaksanakan percepatan pembangunan Infrastruktur di Daerah tertinggal dan terisolir;
5. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas meliputi Umum dan Kepegawaian, Program, Aset dan Keuangan;
6. Pelaksanaan Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kepada pemerintah daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan sesuai dengan fungsinya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 1.4 Sumber Daya Manusia Instansi

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman keadaan pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebanyak 90 orang dan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 90 orang dengan golongan sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**

**Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Golongan**

<b>Golongan (Pegawai Negeri/Honor)</b>	<b>Keadaan 1 Januari 2020 (orang)</b>	<b>Keadaan 31 Desember 2020 (orang)</b>
IV	3	3
III	15	15
II	6	6
I	-	-
PTT	4	4
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
PHL	62	62
<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

**Tabel 1.2.**

**Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Pendidikan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Keadaan 1 Januari 2020 (orang)</b>	<b>Keadaan 31 Desember 2020 (orang)</b>
S3	-	-
S2	2	2
S1	41	41
D III	12	12
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	34	34
SLTP	-	-
SD	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

#### 1.5 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang



perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan serta menyelenggarakan enam fungsi utama, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan tugas di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman meliputi urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. Melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan terisolir;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas meliputi umum dan kepegawaian, program, aset dan keuangan;
- f. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kepada pemerintah daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan sesuai dengan fungsinya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, diidentifikasi permasalahan pembangunan sebagai berikut :

1. Belum adanya program jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan program (Rencana Induk Sistem) maupun validitas *data base* tentang infrastruktur yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
2. Program pembangunan masih bersifat parsial/belum ada keterpaduan.
3. Analisis biaya dan manfaat belum dilaksanakan secara konsekwen dalam setiap pengajuan rencana kegiatan sehingga dampaknya menjadi tidak jelas.
4. Masih sangat kurang memadainya kualitas maupun kuantitas infrastruktur dan prasarana dasar lainnya.
5. Partisipasi masyarakat masih sangat kurang dalam pemanfaatan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibangun.
6. Belum terwujudnya konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan tata ruang daerah.
7. Belum tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tepat dan akurat.

## **1.6 Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat, latar belakang, maksud dan tujuan, serta gambaran, Aspek strategis Organisasi dan sistematika penyajian.

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan secara ringkas tentang Perencanaan Kinerja dan juga Perjanjian Kinerja tahun 2020.

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020, evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksud. Dan juga menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja.

### **BAB IV : PENUTUP**

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Tahun 2020 dan langkah-langkah atau saran-saran yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2020

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada pengeluaran (output) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016 - 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas, misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat mengacu kepada visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yaitu :

**” Terwujudnya Pasaman Barat yang Beriman, Cerdas, Sehat, Bermartabat, Sejahtera serta Berwawasan Lingkungan ”**

Misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat adalah :

Misi Pertama : **Menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi.**

Misi Kedua : **Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan serta mengelola sumberdaya alam dan penataan ruang secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.**

Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang melaksanakan program kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan visi dan misi di atas, ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran strategis pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.**

**Tujuan dan Sasaran**  
**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat**

No.	Tujuan	No.	Sasaran
1.	Mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman layak dan berkualitas serta berkelanjutan	1.	Tersedianya jalan lingkungan yang baik dan berkualitas
		2.	Meningkatnya jumlah rumah tangga bersanitasi layak
		3.	Tersedianya Drainase dan gorong di kawasan permukiman
2.	Menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau	4.	Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat kurang mampu
		5.	Berkurangnya kawasan kumuh
3.	Mewujudkan status kepemilikan tanah pemerintah	6.	Meningkatkan status kepemilikan tanah milik pemerintah
		7.	Meningkatkan penyelesaian konflik pertanahan pemerintah daerah

Kebijakan dan program yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pasaman Barat dijabarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2.**

**Kebijakan dan Program**  
**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat**

No.	Kebijakan	No.	Program
1.	Pemenuhan hak masyarakat miskin atas perumahan, air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup yang baik dan sehat	1.	Program Peningkatan Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan
2.	Terbangunnya Drainase lingkungan yang baik	2.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
3.	Tersedia sarana Pembuangan air limbah	3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
4.	Tersedianya sarana air minum yang layak	4.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
5.	Pengadaan tanah untuk kebutuhan sarana dan prasarana umum	5.	Program pembangunan rumah tidak layak huni
6.	Penataan administrasi perumahan dan kawasan permukiman		



Untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat telah disusun anggaran, sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Anggaran Belanja**  
**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat**  
**Tahun Anggaran 2020**

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.039.823.254	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.000.000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	13.200.000	
4	Program Pengembangan Perumahan	2.148.576.000	
5	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	186.255.000	
6	Program Peningkatan Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan	676.375.984	
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.842.515.000	
<b>T o t a l</b>		<b>7.909.745.238</b>	

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020, maka ditetapkan Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020. Pada tabel berikut akan disajikan Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

**Tabel 2.4.**  
**Penetapan Kinerja**  
**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat**  
**Tahun Anggaran 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020
1	Tersedianya jalan lingkungan yang baik dan berkualitas	Jumlah Terbangunnya Jalan Lingkungan yang Baik dan berkualitas	0 meter
2	Meningkatnya jumlah rumah tangga bersanitasi layak	Persentasi rumah tangga bersanitasi layak	80%
3	Tersedianya akses masyarakat terhadap ketersediaan sanitasi yang layak	Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah	0%
		Jumlah pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan	0 meter
4	Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu	560 Unit
5	Berkurangnya kawasan kumuh	Penurunan luasan kawasan kumuh	0 Ha
6	Meningkatkan status kepemilikan tanah milik pemerintah	Jumlah penerbitan Sertifikat tanah pemerintah daerah	52 Persil
7	Meningkatkan penyelesaian konflik pertanahan pemerintah daerah	Jumlah penyelesaian konflik - konflik pertanahan pemerintah daerah	7 Konflik



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan juga analisis akuntabilitas keuangan.

##### a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah metode pengukuran sederhana yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian setiap indikator kinerja sasaran ditetapkan skala pengukuran dengan kategori sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1.

**Tabel 3.1.**

**Skala dan Kategori Penilaian Capaian Kinerja**

No	Skala Penilaian	Kategori Keberhasilan
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	75% - 84%	Baik
3	56% - 74%	Cukup
4	< 55%	Kurang

## b. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

Hasil pengukuran pencapaian target 8 (Delapan) indikator kinerja utama 7 (Tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2.**

**Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
1	Tersedianya jalan lingkungan yang baik dan berkualitas	Jumlah Terbangunnya Jalan Lingkungan yang Baik dan berkualitas	0 meter	0 meter	0,00%
2	Meningkatnya jumlah rumah tangga bersanitasi layak	Persentase rumah tangga bersanitasi layak	80%	80%	100,00%
3	Tersedianya akses masyarakat terhadap ketersediaan sanitasi yang layak	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan	0 meter	0 meter	0,00%
4	Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu	560 Unit	560 Unit	100,00%
5	Berkurangnya kawasan kumuh	Penurunan luasan kawasan kumuh	0 Ha	0 Ha	0,00%
6	Meningkatkan status kepemilikan tanah milik pemerintah	Jumlah penerbitan Sertifikat tanah pemerintah daerah	52 Persil	52 Persil	100,00%
7	Meningkatkan penyelesaian konflik pertanahan pemerintah daerah	Jumlah penyelesaian konflik - konflik pertanahan pemerintah daerah	7 Konflik	7 Konflik	100,00%
<b>TOTAL</b>					<b>100,00%</b>



### 1.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja

Perbandingan data kinerja antara realisasi tahun 2020 dengan tahun sebelumnya bertujuan untuk melihat kemajuan dan kemunduran kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang guna mengetahui perlu dilakukan analisis kecenderungan kinerja suatu instansi apakah meningkat atau menurun.

**Tabel III.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**  
**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat**  
**Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Tersedianya jalan lingkungan yang baik dan berkualitas	Jumlah Terbangunnya Jalan Lingkungan yang Baik dan berkualitas	199	122	0
	Meningkatnya jumlah rumah tangga bersanitasi layak	Persentase rumah tangga bersanitasi layak	65	70	80
2	Tersedianya akses masyarakat terhadap ketersediaan sanitasi yang layak	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan	41	24	0
3	Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu	200	156	560
4	Berkurangnya kawasan kumuh	Penurunan luasan kawasan kumuh		13	0
5	Meningkatkan status kepemilikan tanah milik pemerintah	Jumlah penerbitan Sertifikat tanah pemerintah daerah	22	47	52
6	Meningkatkan penyelesaian konflik pertanahan pemerintah daerah	Jumlah penyelesaian konflik - konflik pertanahan pemerintah daerah		0	7

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami keberhasilan dalam pencapaian kinerja untuk tahun 2020,

dibandingkan dengan tahun sebelumnya terus terjadi peningkatan yang signifikan hal ini tentu berkat kerja keras sehingga dapat dicapai kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020 tersebut.

### 3.1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan serta solusi yang dilakukan

Adapun penyebab keberhasilan capaian kegiatan yang dilakukan untuk oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penataan Ruang, adalah sebagai berikut :

#### 1. Tersedianya jalan lingkungan yang baik dan berkualitas

Keberhasilan capaian sasaran Tersedianya jalan lingkungan yang baik dan berkualitas ditentukan dengan satu indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
1	Tersedianya jalan lingkungan yang baik dan berkualitas	Jumlah Terbangunnya Jalan Lingkungan yang Baik dan berkualitas	0 meter	0 meter	0 %

Capaian Kinerja dari indikator tersebut **“Kurang”**, hal ini disebabkan oleh adanya reffocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid 19.

#### 2. Tersedianya akses masyarakat terhadap ketersediaan sanitasi yang layak

Keberhasilan capaian sasaran Tersedianya akses masyarakat terhadap ketersediaan sanitasi yang layak ditentukan dengan dua indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
1	Tersedianya akses masyarakat terhadap ketersediaan sanitasi yang layak	Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah	80	80	100%

Capaian Kinerja dari indikator tersebut **“Sangat Baik”**, hal ini dapat diraih karena pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

##### a. Pembangunan Septic Tank Komunal

Pembangunan Septik Tank Kamunal ini dilaksanakan di 6 (enam) nagari di Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebanyak 34 Unit yang dapat melayani sebanyak 221 Kepala Keluarga.



b. Pembangunan Septik Tank Individual

Pembangunan Septik Tank Individual untuk keluarga sebanyak 198 unit untuk 198 Kepala Keluarga

**3. Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat kurang mampu**

Keberhasilan capaian sasaran Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat kurang mampu ditentukan dengan satu indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
1	Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu	560	560	100,00%

Capaian Kinerja dari indikator tersebut **“Sangat Baik”**, hal ini dapat diraih karena pelaksanaan pekerjaan ini tertangani rehap rumah masyarakat kurang mampu sebanyak 560 unit di Kabupaten Pasaman Barat di 18 Kenagarian. Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan ini tidak ditemukan permasalahan

**4. Berkurangnya kawasan kumuh**

Keberhasilan capaian sasaran Berkurangnya kawasan kumuh ditentukan dengan satu indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
1	Berkurangnya kawasan kumuh	Penurunan luasan kawasan kumuh	0 Ha	0 Ha	0,00%

Capaian Kinerja dari indikator tersebut **“Kurang”**.

**5. Meningkatkan status kepemilikan tanah milik pemerintah**

Keberhasilan capaian sasaran Meningkatkan status kepemilikan tanah milik pemerintah ditentukan dengan satu indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
1	Meningkatkan status kepemilikan tanah milik pemerintah	Jumlah penerbitan Sertifikat tanah pemerintah daerah	52 Persil	52 Persil	100,00%

Capaian Kinerja dari indikator tersebut **“Sangat Baik”**.

## 6. Meningkatkan penyelesaian konflik pertanahan pemerintah daerah

Keberhasilan capaian sasaran Meningkatkan penyelesaian konflik pertanahan pemerintah daerah ditentukan dengan satu indikator, adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
1	Meningkatkan penyelesaian konflik pertanahan pemerintah daerah	Jumlah penyelesaian konflik - konflik pertanahan pemerintah daerah	7 Konflik	7 Konflik	100,00%

### 3.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2020, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki anggaran Rp. **7.909.745.238,00** dengan realisasi sebesar Rp. **7.525.133.403,00** atau **95,14%** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	%
1	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	564.689.254	450.751.837	79,82
2	Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	303.904.000	281.067.200	92,49
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	171.230.000	125.990.776	73,58
4	Pengadaan Peralatan/Kendaraan Dan Mesin	3.000.000	3.000.000	100
5	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	13.200.000	12.880.000	97,58
6	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	191.124.000	182.358.680	95,41
7	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (Sumber Dana DAK)	1.957.452.000	1.951.080.000	99,67
8	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	7.605.000	5.670.500	74,56

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	%
	Penerbitan dan pemecahan sertifikat tanah Pemerintah Daerah	178.650.000	136.716.000	76,53
10	Pembangunan Jalan Lingkungan	379.614.000	376.859.850	99,27
11	Penyusunan database RK2KPKP	-	-	0,00
12	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	296.761.984	276.624.460	93,21
13	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	12.515.000	12.114.550	96,80
14	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (Sumber Dana DAK)	3.830.000.000	3.710.019.550	96,87
<b>TOTAL</b>		<b>7.909.745.238</b>	<b>7.525.133.403</b>	<b>95,14</b>



## **BAB IV**


### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2020, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 14 (delapan belas) Kegiatan dalam 7 (tujuh) program
2. Hasil pencapaian atas indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/ penilaian adalah sebagai berikut :
  - Terlaksana dengan “ sangat baik” sebanyak 4 (Empat) indikator sasaran strategis atau sebesar 100 %. Hal ini karena pada sasaran strategis ini yang anggarannya tersedia.
  - Tidak terlaksana sebanyak 3 (satu) indikator sasaran strategis karena refocussing anggaran dalam rangka penanganan COVID 19
3. Hal tersebut berarti bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2020 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 86.24 % (dengan klasifikasi pengukuran penilaian : sangat baik)
4. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan tidak dilaksanakan karena anggarannya tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
  - b. Adanya refocussing Anggaran dalam rangka penanganan Covid 19 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak ada lagi anggarannya..

Padang Tujuh, Januari 2021

Kepala Dinas

  
**AHDIYARSYAH,ST.MT**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19770122 200312 1 002